

# BAB I

## PENDAHULUAN

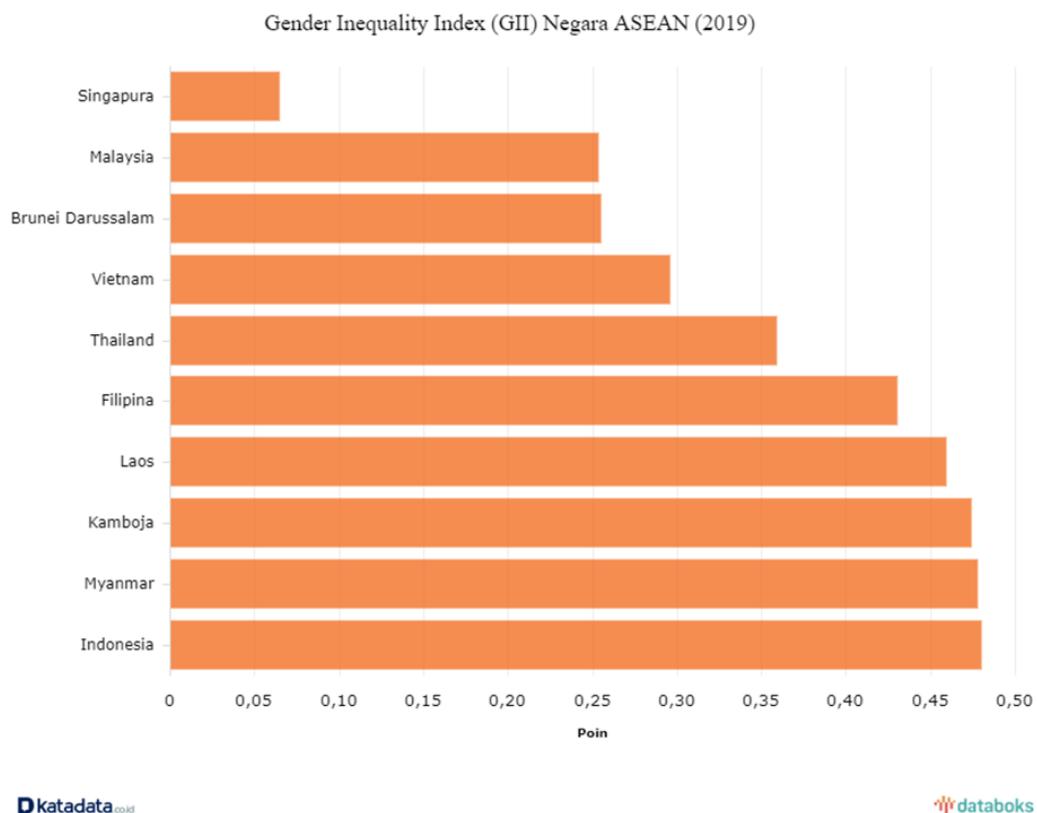
### 1.1 Latar Belakang

Dalam era modern saat ini, isu terkait dengan studi hubungan internasional terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Isu yang berkembang tidak hanya sebatas membahas hubungan politik dan pertahanan suatu negara saja, namun meluas pada isu – isu non-tradisional seperti isu lingkungan hidup, kesehatan, budaya, pendidikan dan isu – isu sosial seperti halnya kesetaraan gender. Dewasa ini, persoalan gender menjadi sebuah isu yang penting secara internasional. Kesetaraan gender menjadi isu yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat internasional. Secara moralitas, kesetaraan gender menjadi hal yang utama karena hal ini termasuk ke dalam hak asasi yang harus didapatkan oleh manusia. Kesetaraan gender penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki – laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami oleh perempuan. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga muncul ketika adanya perempuan yang menerima pengecualian ataupun kerugian dalam proses pengambilan keputusan dan akses ke sumber daya baik ekonomi maupun sosial (UNFPA, 2005).

Pentingnya menciptakan kesetaraan gender juga termasuk ke dalam 17 agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) yang telah disepakati oleh negara – negara di dunia. Pada tujuan ke-5 dari SDGs dituliskan tentang *Gender Equality*. Poin ini memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan pada gender dan adanya pemberdayaan baik terhadap perempuan dewasa, maupun anak perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak perempuan saat ini mewakili setengah dari populasi dunia, dan karena itulah setengah dari itu memiliki potensi. Tetapi sayangnya, ketidaksetaraan gender terjadi dimana – mana dan menghambat kemajuan sosial (United Nations, 2015). Padahal, kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif (Bappenas, 2015).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kesetaraan gender yang rendah. Menurut data *United Nations Development Programme* (UNDP) yang

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki indeks ketimpangan gender (*Gender Inequality Index/ GII*) tertinggi di Kawasan ASEAN, yakni sebesar 0.48 poin. Hal ini menunjukkan, Indonesia merupakan negara dengan pencapaian pembangunan gender yang belum optimal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tidak hanya di wilayah ASEAN, pencapaian pembangunan gender di Indonesia pun belum optimal jika dibandingkan dengan negara – negara di dunia. Hal ini ditunjukkan oleh posisi Indonesia yang berada di peringkat ke 121 dari 162 negara dengan ketimpangan gender terbesar pada tahun 2019 (Dihni, 2021).



Gambar 1. Gender Inequality Index ASEAN (2019)

Menurut Bappenas, kata gender sendiri dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki – laki. Antara gender dan jenis kelamin (seks), keduanya memiliki pengertian yang jauh berbeda. Walaupun keduanya tentu memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Namun saat ini, mayoritas masyarakat banyak menilai bahwa gender dan jenis kelamin (seks) adalah dua hal yang sama. Jenis kelamin (seks) merupakan kodrat yang secara alamiah ada pada fisik manusia. Sementara gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (D. William, 2006).

Persamaan persepsi antara arti kata gender dan jenis kelamin seringkali menimbulkan ketimpangan karena munculnya ketidakadilan gender dengan subjek yang terlibat. Perempuan kerap memperoleh hak yang tidak sebanding dengan apa yang diperoleh oleh laki – laki. Seorang laki – laki digambarkan identik sebagai seorang pemimpin dan selalu berada di posisi atas, sementara perempuan selalu dinilai hanya mampu memberikan kontribusi dalam kebutuhan rumah. Hal ini terkait dengan aktivitas laki – laki yang cenderung untuk mencari nafkah bagi keluarganya dimana posisi mereka sebagai seorang kepala keluarga, dan perempuan hanya berkontribusi dalam kebutuhan dasar sehari – hari, seperti mengurus rumah dan mendidik anak (DTE, 2014).

Pola pikir seperti diatas sudah banyak tertanam pada mayoritas pikiran laki – laki zaman dahulu hingga saat ini, seperti halnya dalam budaya patriarki. Salah satu penyebab kesetaraan gender yang sulit diraih oleh bangsa Indonesia adalah karena kentalnya budaya patriarki yang ada. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (PPPA) pada tahun 2019, yang menyatakan bahwa rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan (69.18) dibandingkan dengan IPM laki – laki (75.96) berkaitan dengan konstruksi sosial patriarki yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki – laki padahal perempuan adalah kekuatan bangsa. Dimana berdasarkan sensus 2020, perempuan mengisi 49.42% dari populasi di Indonesia atau sekitar 133.54 juta jiwa. Selain itu berdasarkan *McKinsey Global Institute Analysis*, Indonesia dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 135 miliar per tahun di tahun 2025, dengan catatan partisipasi ekonomi perempuan terus ditingkatkan pula (KEMENPPPA, 2021).

Dalam budaya patriarki, peran perempuan difokuskan pada tugas domestik dalam urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Menurut Alfian Rokhmansyah

(2016) di bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme*, patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti sebuah struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan (Rokhmansyah, 2016).

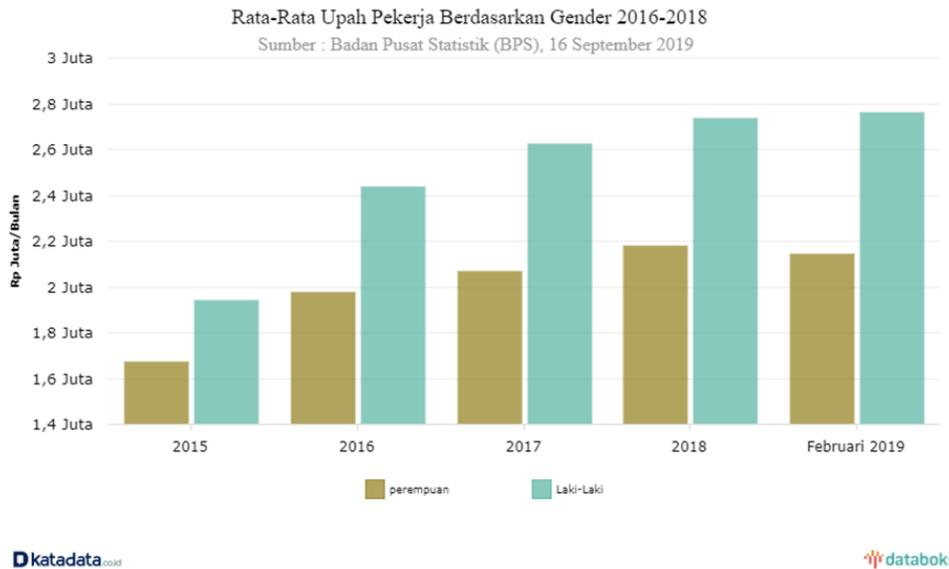
Budaya patriarki yang ada tersebut dapat menimbulkan banyaknya permasalahan ketimpangan, seperti:

- a. Marginalisasi kaum perempuan yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan tentang posisi dalam pekerjaan perempuan yang dianggap lebih rendah dari pada laki – laki.
- b. Subordinasi atau penomorduaan keyakinan terhadap salah satu jenis kelamin yang dianggap lebih penting, lebih utama, dan lebih pokok dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.
- c. Stereotipe yang merupakan citra baku mengenai individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan yang dapat merugikan kaum perempuan.
- d. Kekerasan yang merupakan sebuah serangan terhadap fisik maupun psikis atau integritas mental psikologis seseorang. Dalam hal ini, kekerasan tersebut mencakup hal – hal fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, serta kekerasan dalam bentuk non-verbal seperti pelecehan (*sexual harassment*).
- e. Peran ganda yang muncul menjadi beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Terdapat beberapa observasi yang menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan di rumah tangga sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan di rumah tangga atau domestik. Adanya sudut pandang dan anggapan peran gender seperti ini

dapat menimbulkan rasa bersalah kepada perempuan jika mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang berada di sektor domestik. Bagi kaum laki- laki hal ini dianggap sebagai bukan tanggung jawabnya dan bahkan di sebagian besar tradisi, laki-laki justru dilarang untuk terlibat dalam pekerjaan domestik (Fakih, 2008).

Menurut jurnal Rahmi Fitrianti (2012) yang berjudul Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan, dikatakan bahwa akar dari ketidaksetaraan gender terletak pada sektor pendidikan. Ketidaksetaraan pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan ungkapan Suryadi & Idris (2004) bahwa latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki – laki dan perempuan menjadi faktor utama penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah dalam menyuarakan pendapat.

Pendidikan yang rendah pada perempuan sangat berpengaruh terhadap akses pada sumber – sumber produksi, di mana mereka akan lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan – pekerjaan informal yang memiliki upah rendah. Selain itu, pengaruh pendidikan juga memperlihatkan kecenderungan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin besar ketidaksetaraan gender dalam sistem pengupahan tersebut terjadi (Suryadi & Idris, 2004). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait laporan perekonomian tahun 2019 mencatat bahwa kesenjangan upah antara pekerja laki – laki dan perempuan semakin lebar. Upah untuk pekerja laki – laki lebih tinggi daripada upah pekerja perempuan. Selama periode 2015 hingga Februari 2019, selisihnya mencapai Rp. 492.2 ribu. BPS juga menyebutkan bahwa kesenjangan upah ini merupakan isu lama karena adanya anggapan perempuan kurang berkontribusi dalam pekerjaan. Selain itu, perempuan sendiri juga menjadi cenderung ditempatkan pada posisi – posisi yang bernilai rendah.



*Gambar 2. Rata-rata Upah Pekerja Berdasarkan Gender 2016-2018*

Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat kemajuan besar dalam mencapai kesetaraan gender pada sektor pendidikan selama satu dekade terakhir ini. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya tingkat literasi ataupun angka partisipasi sekolah, serta kebijakan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender. Selain itu, hal tersebut juga dapat dilihat dari perbandingan *Gender Parity Index* (GPI) Indonesia pada tahun 1970-an hingga 2019. Pada tahun 1970-an, GPI untuk angka partisipasi sekolah (rasio anak perempuan terhadap anak laki – laki yang terdaftar di sekolah) pada anak usia 7-12 tahun adalah 0.89. Kesenjangan ini juga bertambah lebar seiring dengan bertambahnya umur anak – anak. Namun pada tahun 2019, Indonesia telah berhasil mencapau kesetaraan gender dalam hal partisipasi sekolah di tingkat nasional dengan GPI 1.00 untuk angka partisipasi sekolah pada anak – anak usia 7-12 tahun.

Namun, menurut laporan Worldbank 2020 tentang kesetaran gender di Indonesia, terdapat beberapa hal menarik, salah satunya yaitu paradoks bahwa meskipun perempuan Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan (tingkat partisipasi pendidikan tinggi), hal itu tidak berlanjut kepada tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Artinya, meskipun partisipasi gender dalam pendidikan tinggi, kesetaraan gender belum dapat dicapai sepenuhnya (Noah & Rythia, 2020). Perempuan masih kurang terwakili, baik pada

posisi kepemimpinan di lingkungan sekolah hingga pemerintahan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pada tingkat nasional, meskipun anak perempuan berprestasi jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan anak laki – laki di sekolah, namun jumlah perempuan yang bekerja lebih sedikit, selain itu perempuan juga mendapatkan penghasilan lebih rendah, dan lebih sedikit mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan.

Sementara dalam laporan UNESCO pada *Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2003/2004*, menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai melalui tiga hak dasar, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan (*rights to education*), hak dalam proses pendidikan di dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender (*rights within education*), dan hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian berkeadilan (*rights trough education*) (UNESCO, 2004). Hak untuk mendapatkan pendidikan saat ini mungkin sudah mulai tercapai dengan tinggi tingkat partisipasi pendidikan oleh perempuan. Namun hak dalam memperoleh lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dalam proses pendidikan dapat dikatakan masih kurang baik. Hal ini dikarenakan bahwa hak tersebut tidak hanya terhenti pada pemenuhan kebutuhan pendidikan formal kepada anak – anak perempuan tersebut saja, namun juga membahas mengenai peran dan fungsi mereka di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya adalah dengan mereka dapat bersuara, berpendapat, beropini, dan dapat menjadi seorang pemimpin di lingkungannya. Hal ini memiliki dampak besar pada hak selanjutnya yang wajib mereka dapatkan, yaitu hak akan hasil dari pendidikan untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender. Hak ini akan tercipta ketika perempuan dan laki – laki mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh karir, pendapatan upah, serta kontribusi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam mencapai hal tersebut, maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas di dalam diri perempuan – perempuan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih terbatas dalam meningkatkan kesetaraan gender. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan gender. Salah satu strateginya adalah Pengarusutamaan Gender Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dimana pemerintah pusat dan daerah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan

dan penganggaran untuk memastikan ada keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki – laki, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Melihat luasnya dan besarnya cakupan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, sinergitas menjadi kunci untuk mempercepat perwujudannya (DP3AKB JABAR, 2020).

UNESCO menyebutkan bahwa perubahan sosial, yang dalam hal ini adalah kesetaraan gender, memang bukan sesuatu yang mudah dan dapat terjadi secara instan, memerlukan waktu yang panjang untuk pada akhirnya dapat terciptanya kesetaraan gender. Namun, hal itu tidak akan dapat diraih jika tidak adanya pemberdayaan perempuan secara langsung. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membuat masyarakat mampu memajukan diri sendiri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki menuju kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol pada segala sumber daya, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Hal ini dilakukan agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga mereka mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, serta mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Kesetaraan gender dalam Pendidikan dapat diwujudkan dengan adanya sinergi antar lembaga baik pada lembaga pemerintahan negara ataupun yayasan/organisasi nasional hingga masyarakat sekalipun. NGO atau *Non-Governmental Organization* menjadi salah satu aktor dalam hubungan internasional yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan sosial, seperti halnya kesetaraan gender. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan turut memperjuangkan permasalahan yang ada di masyarakat, maka peran *Non-Governmental Organization* (NGO) dapat menjadi kunci (Kristopel, 2019). Menurut UNESCO, saat ini NGO memiliki peranan penting di banyak negara dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian dengan cara yang inovatif (UNESCO, 2004).

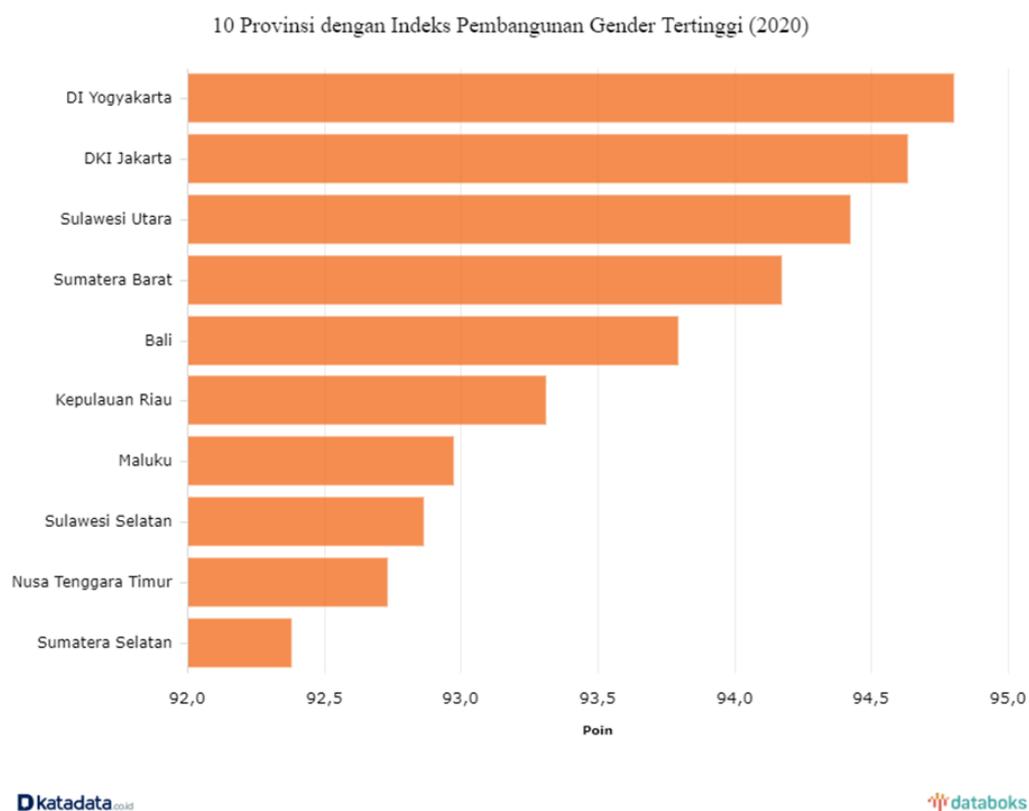
Terdapat beberapa NGO baik nasional maupun internasional yang sudah berfokus terhadap isu kesetaraan gender pada daerah – daerah di Indonesia seperti Lembaga *Econatural Society* yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan di Kota Makassar. Sedangkan di Bandung sendiri terdapat komunitas Samahita Bandung yang merupakan komunitas yang membuat kampanye anti-kekerasan dan pelecehan seksual yang berbasis di Kota Bandung. Komunitas ini berfokus pada kampanye, edukasi, dan pendampingan khusus. Lembaga dan komunitas yang ada saat ini masih sangat terbatas pergerakannya karena masih berskala nasional dan masih hanya bergerak untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi bukan menanggulangnya.

Maka dari itu, CARE Indonesia muncul menjadi salah satu *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berfokus pada isu keadilan gender & inklusi sosial. Yayasan CARE Peduli (YCP) atau yang lebih dikenal dengan CARE Indonesia merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang bergerak dibidang perlindungan manusia untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. CARE Indonesia merupakan bagian dari CARE Internasional yang berkantor pusat di Ottawa, Canada. Sebagai sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO), CARE berfokus untuk menempatkan perempuan dan anak perempuan pada tujuan utama mereka. Mereka percaya bahwa kemiskinan tidak akan dapat diatasi jika semua orang (perempuan dan anak perempuan) tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama.

CARE memiliki visi untuk menciptakan dunia yang penuh harapan, inklusi, dan keadilan sosial, dimana kemiskinan telah diatasi dan semua orang hidup dengan bermartabat dan aman. Serta misi untuk bekerja diseluruh dunia untuk menyelamatkan nyawa, mengalahkan kemiskinan dan mencapai keadilan sosial. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, CARE memiliki beberapa program dan salah satunya adalah Program Kemajuan Pribadi dan Peningkatan Karir (*Personal Advancement and Career Enhancement*). Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan personal seorang anak perempuan untuk pengembangan dirinya menuju peningkatan karir demi kehidupan yang lebih baik. Program ini dilaksanakan dengan memberikan modul pengembangan pribadi kepada siswa sekolah menengah pertama, usia 12 – 14 tahun, dengan tujuan agar siswa

perempuan tersebut dapat lebih percaya diri dan akan lebih siap untuk berkomunikasi dan membuat keputusan yang matang dengan keluarga mereka tentang sekolah dan masa depan yang mereka miliki (CARE Indonesia, 2020).

Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat menjadi target utama dalam pelaksanaan Program *Personal Advancement and Career Enhancement* (PACE). Sebagai daerah yang memiliki tata letak dekat dengan ibukota Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Namun, terbukti bahwa dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, Provinsi Jawa Barat tidak termasuk kedalam daftar 10 Provinsi dengan Indeks Pembangunan Gender tertinggi di Indonesia. Provinsi dengan capaian kesetaraan gender terbaik diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan poin 94,80 poin dan disusul oleh DKI Jakarta dengan skor 94,63 poin.



Gambar 3. Provinsi dengan Indeks Pembangunan Gender Tertinggi

Pada daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banyak anak – anak perempuan dan remaja perempuan yang menghadapi berbagai tantangan terhadap kemiskinan yang terjadi, terutama jika mereka tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang baik. Mereka akan cenderung untuk melakukan pekerjaan informal yang dibayar dengan upah rendah atau malah tidak dibayar sepeserpun, dan mereka pun rentan terhadap perlakuan buruk seperti pelecehan seksual atau kekerasan berbasis gender yang terjadi secara umum.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat pada Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2018 – 2020, dapat dilihat bahwa Kabupaten Bandung memiliki penurunan dalam komponen perempuan sebagai tenaga profesional dari tahun 2018 dengan persentase 37.36%, pada tahun 2019 dengan persentase 37.90%, dan di tahun 2020 dengan persentase 36.51% (Badan Pusat Statistik, 2020). Maka dari itu, CARE Indonesia hadir di Kabupaten Bandung untuk membantu memberikan solusi dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Bandung.

Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* tujuan 5 yaitu *Gender Equality*, untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia dibantu oleh salah satu *Non-Governmental Organization* yang berfokus pada isu keadilan gender & inklusi sosial, yaitu Yayasan CARE Peduli atau yang lebih dikenal dengan CARE Indonesia. Untuk dapat mewujudkan kesetaraan gender, CARE Indonesia memiliki program yang ditargetkan untuk anak – anak remaja perempuan, yaitu program untuk meningkatkan kapasitas diri (*capacity building*) dengan nama *Personal Advancement and Career Enhancement* (PACE). Program ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama langsung antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan NGO CARE Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut, kerjasama ini pada awalnya hanya dimaksudkan untuk melakukan program peningkatan kapasitas diri, ketahanan pada lingkungan yang kurang mendukung, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesetaraan gender di sekolah – sekolah dan desa di Kabupaten Bandung. Namun, seiring berjalannya waktu, program ini terus diperpanjang dan juga akan diadaptasi serta dikembangkan oleh pemerintah daerah di bawah Dinas Pendidikan

untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk mengurangi jumlah kasus perkawinan anak, meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan, dan menghentikan kekerasan terhadap anak perempuan.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan sebuah negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat, baik perempuan dan laki – laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka (Bappenas, 2015). Sama halnya dengan yang tertulis pada penelitian terdahulu mengenai **Kesetaraan Gender** yang telah dilakukan oleh Tessa J. Roseboom (2020), ia mengatakan bahwa permasalahan terkait kesetaraan gender ini bukan hanya menjadi masalah bagi kaum perempuan saja namun juga akan berdampak kepada generasi mendatang. Selama perempuan selalu dihadapkan dengan masalah kemiskinan, kekerasan, dan kesehatan mental serta sulitnya untuk mengakses makanan dengan kualitas baik ataupun pendidikan yang tinggi, maka hal ini tidak akan hanya berdampak kepada perempuan tersebut namun juga terhadap pembangunan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, Helena Morais Maceira (2017) mengatakan bahwa kesetaraan gender dapat membantu sebuah negara untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Kesetaraan gender yang baik akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan pendapatan perkapita sebuah negara, sehingga dapat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan kesetaraan gender, aktor non-negara atau *Non-Governmental Organization* (NGO) memiliki peranan yang penting. Penelitian terdahulu terkait dengan **Peran Non-Governmental Organization (NGO)** yang dikemukakan oleh Enamol Hassan (2015) mengatakan bahwa NGO memiliki peran besar dalam mempromosikan pembangunan sosial di Bangladesh. NGO bekerja untuk memastikan bahwa pembangunan sosial ekonomi juga akan berdampak untuk masyarakat yang tidak mampu, dimana hal ini sering terlewatkan dan terpinggirkan oleh sektor negara dan bisnis. Kedua sektor tersebut, baik negara ataupun bisnis, seringkali melaksanakan pembangunan karena adanya implikasi politik ataupun untuk memaksimalkan keuntungan. Namun sebagai lembaga non-

profit, NGO melaksanakan hal tersebut atas dasar kemanusiaan untuk membantu masyarakat miskin dan perempuan dalam mencapai kesetaraan. Sementara, Elena V. Kucheryavaya (2016) mengatakan bahwa NGO harus bekerja secara koalisi untuk dapat melakukan kolaborasi sehingga mereka bisa mendapatkan banyak support dari institusi lainnya untuk mempromosikan kegiatan mereka secara lebih luas lagi.

CARE Indonesia mengeluarkan sebuah program *Personal Advancement and Career Enhancement* (PACE), program ini merupakan sebuah program capacity building yang bertujuan untuk pemberdayaan remaja perempuan di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai **Pemberdayaan Perempuan**, Cyril Anfasha Firmansyah & Estro Dariatno Sihalo (2021) mengatakan dalam penelitiannya bahwa pemberdayaan perempuan dari 34 provinsi di Indonesia telah membawa dampak positif yang signifikan untuk rasio pendapatan per-kapita Indonesia. Endalcachew Bayeh (2016) menyatakan bahwa fakta tentang populasi perempuan adalah setengah dari populasi suatu negara, membuat pemberdayaan perempuan menjadi hal yang efektif untuk pembangunan sebuah negara. Perlu adanya komitmen untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan memanfaatkan semua potensi negara demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. I Gusti Ayu Purnamawati & Made Suryana Utama (2019) berpendapat bahwa strategi pemberdayaan perempuan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan perempuan diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengaktualisasikan potensi dirinya agar mampu mandiri & bekerja, mengentaskan diri mereka dari keterbatasan Pendidikan & keterampilan, serta ketertindasan akibat perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak.

Berlandaskan beragam pemahaman dari penelitian terdahulu diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai peran CARE Indonesia sebagai sebuah NGO terhadap isu kesetaraan gender melalui program peningkatan kapasitas diri (*capacity building*) yaitu *Personal Advancement and Career Enhancement* (PACE). Dengan latar belakang masalah penelitian diatas serta kajian pustaka yang telah peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melihat adanya gap ataupun celah bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan

judul : **“Peran CARE Indonesia sebagai sebuah NGO dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender melalui Program *Personal Advancement and Career Enhancement* (P.A.C.E) Periode 2019 – 2022”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Jika dibandingkan dengan negara – negara di ASEAN ataupun di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kesetaraan gender yang masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh UNDP dan dipublikasikan kembali oleh BPS, bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam Indeks Ketimpangan Gender di ASEAN. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota PBB dalam Tujuan 5 pada Pembangunan Berkelanjutan, yaitu terciptanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sebagai sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berfokus pada keadilan gender dan inklusi sosial, CARE Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satunya melalui program peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk anak – anak remaja di Kabupaten Bandung. Program ini diharapkan kedepannya dapat diadopsi oleh pemerintah setempat untuk membantu dalam mengurangi jumlah kasus perkawinan anak, meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

**Bagaimana peran CARE Indonesia sebagai sebuah NGO pada kasus kesetaraan gender di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melalui program *capacity building* “*Personal Advancement and Career Enhancement*” (PACE) periode 2019 – 2022?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, memaparkan, dan menjelaskan peran CARE Indonesia sebagai sebuah *Non-Governmental Organizations* (NGO) dalam isu kesetaraan gender yang dilakukan melalui program *capacity building* “*Personal Advancement and Career Enhancement* (PACE)” di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hubungan internasional serta pembelajaran terkait peran Non-Governmental Organization (NGO) terhadap isu kesetaraan gender di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan tambahan informasi bagi pembaca yang tertarik terhadap isu kesetaraan gender yang dilakukan oleh NGO CARE Indonesia dimana gambaran strategi, hasil analisis, dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi pembaca untuk menganalisis kasus serupa.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan penelitian yang dibahas, untuk itu peneliti membagi penelitian ini ke dalam beberapa bagian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi uraian latar belakang masalah penelitian yang akan diteliti beserta pemaparan terkait hasil pemikiran beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian ini. Lalu terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bagian ini, berisi uraian mengenai konsep dan teori yang digunakan peneliti sebagai sarana untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian, kerangka pemikiran, dan alur pemikiran.

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai teknis penelitian melalui objek penelitian, jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, serta waktu dan lokasi penelitian.

### **BAB IV      KESETARAAN GENDER DAN PENDIDIKAN**

### **BAB V      PERAN CARE DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER      MELALUI      PROGRAM      *PERSONAL ADVANCEMENT AND CAREER ENHANCEMENT (PACE) DI INDONESIA PERIODE 2019 – 2022***

### **BAB VI      PENUTUP**